

© 2004 Djafar E D  
Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702)  
Sekolah Pasca Sarjana / S3  
Institut Pertanian Bogor  
Mei 2004

Posted: 14 May 2004

Dosen:  
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab)  
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto, M.Sc  
Dr. Ir. Hardjanto, M.Sc

## **KEKOHESIFAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN**

Oleh:

**Djafar E. D.**

P15600010/PWD

[djafared53@hotmail.com](mailto:djafared53@hotmail.com)

### **I. PENDAHULUAN**

Selama kurang 32 tahun Negara Republik Indonesia di bawah kendali Rezim *Orde Baru* yang sangat sentralistik, kaku, seragamisasi, massa mengambang dan masih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan ketidakbebasan di lingkungan masyarakat umum maupun yang ada dalam struktur pemerintahan, tumbuh dengan suburnya. Dalam pembangunan, terjadi over concentration, seakan-akan segala sesuatunya difahami benar oleh pusat, tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain. Kalaupun ada keterlibatan dari pihak yang tersangkut paut dengan akriivitas pembangunan, tidak lebih dari sekedar “mobilisasi”. Kesemuanya ini menjadi satu kesatuan yang sulit dirubah, bahkan menjadi hal yang bertentangan ketika ada orang atau kelompok masyarakat yang mencoba untuk mengeritik atau mengklaim sebagai

prektek-praktek yang sangat jauh dari prinsip demokrasi. Ironisnya, kritik yang konstruktif dan masukan-masukan dari masyarakat yang sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya, justru dianggap sebagai musuh pamerintah/penguasa.

Sejak pertengahan 1997, tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi Indonesia mulai menampak ditandai dengan menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, tetapi bukan saja Indonesia yang mengalaminya. Ketika itu Korea dan Thailand mengalami nasib serupa, Ketika itu (Stiglitz, 2002) menyatakan angka pengangguran di Korea naik empat kali lipat, di Thailand tiga kali lipat dan di Indonesia meningkat 10 kali lipat, sedangkan kemiskinan masing-masing di Korea hampir tiga kali lipat (diperkotaan) dan di Indonesia meningkat dua kali lipat. Hanya saja mereka cepat mengatasi dan dapat keluar dari kesulitan itu. Sebaliknya Indonesia justru terpuruk terus tanpa ada tanda-tanda perbaikan, bahkan keterpurukannya itu mencapai titik yang paling kritis ketika nilai tukar 1 US Dollar setara dengan Rp. 16.000 pada awal tahun 1998. Tidak hanya sebatas krisis moneter saja yang dialami Indonesia, justru yang paling parah adalah keadaan ekonomi yang merambah ke seluruh masyarakat Indonesia. Dalam tempo sekejap, Indonesia telah berada pada kategori negara miskin dengan income perkapita sekitar 680 US Dollar, padahal sebelumnya (pada tahun 1996), sudah mencapai 1000 US Dollar, bahkan ketika itu Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi menakjubkan.

Memasuki era Reformasi, pasca Orde Baru yang dicirikan sebagai alam demokratisasi mempunyai makna yang berdimensi luas. Keran-keran kebebasan mengemukakan pendapat, mengeritik, meyalurkan aspirasi dan kebebasan-kebebasan lain yang normatif sifatnya, kini terbuka luas. Sampai-sampai membatalkan keputusan hasil pemilihan

Bupati/Walikota misalnya, terjadi di beberapa daerah, karena dianggap tidak layak untuk memimpin dan bukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Inilah merupakan contoh sifat kritis masyarakat dari sekian banyak kasus selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Namun di sisi lain khususnya kinerja ekonomi Indonesia, hingga saat ini belum ada tanda-tanda membaik. Proses untuk menuju kepada peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih baik, nampaknya masih memerlukan waktu yang cukup lama dan hal tersebut bisa dicapai, manakala kondisi sosial dan politik negara kita stabil. Stabilitas dalam pengertian bahwa terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan untuk dapat berpikir tenang dan bekerja lebih baik untuk mengejar ketertinggalan kita.

Dalam menyikapi keadaan yang masih tidak menentu ini, maka selayaknya jika semua pihak menyadari bahwa keterpurukan kita dalam bidang ekonomi disusul berbagai permasalahan pelik di seputar sosial politik bangsa kita, perlu diatasi secara bersama-sama, meskipun pemecahannya tidak semudah yang kita bayangkan. Kesiediaan untuk memasuki kanchah ini, merupakan tanggung jawab kita semua dan bukan hanya tugas pemerintah saja. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam profesi, apakah dia petani, buruh, nelayan dan profesi-profesi lainnya, merupakan kekuatan yang ampuh dalam menggerakkan pembangunan. Oleh karena itu, keterbatasan-keterbatasan mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan akibat sistem yang berlaku (sentalistik dan top-down) selama ini, perlu adanya pembaharuan untuk memberdayakan mereka dan dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang dicita-citakan.

## **II. MEMUPUK KEKOHESIFAN MASYARAKAT**

Kohesif dalam konteks ini, merupakan keterpaduan, keserasian dan kebersamaan dalam suatu sistem kemasyarakatan, Jika tiga aspek

tersebut menyatu dalam suatu bingkai yang permanen, maka pada dasarnya akan membentuk “**kekuatan**” (power) yang memiliki daya tangkal tinggi, peka terhadap sesuatu yang dihadapi dan memiliki kemauan yang tinggi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Menurut **Festinger (dalam Yusuf, 1990)** bahwa kekohesif kelompok merupakan hasil menyeluruh dari tindakan para anggota kelompok yang berbekas dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, kohesif kelompok yang tinggi akan mengisyaratkan keaktifan dan partisipasi para anggota kelompok yang tinggi pula. Di samping itu kehesif kelompok yang tinggi mampu menumbuhkan loyalitas terhadap kelompok, hal mana juga ditunjukkan melalui konformitas para anggota kelompok. Kesemuanya ini bisa menjadi kekuatan kelompok (**Cartwright, Zander dan Hollander, dalam Yusuf, 1990**). Berdasarkan pandangan-pandangan di atas memberikan indikasi bahwa keterpaduan, keserasian dan kebersamaan dapat diperoleh dari hasil menyeluruh dari para anggota kelompok.

Dengan demikian dapat dirumuskan, untuk mencapai tingkat kekohesifan yang tinggi dalam realitas yang sesungguhnya, maka paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan : **Pertama**, menggalang potensi masyarakat, maksudnya dalam suatu komunitas sangat jarang ditemui adanya sifat-sifat yang homogen murni, betapapun komunitas tersebut relatif kecil jumlahnya. Berarti komunitas yang dimaksud memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari segi pengetahuan atau latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman dan latar belakang ekonomi. Potensi yang ada, perlu diidentifikasi sebagai input yang sangat berharga sebagai data awal untuk dimanfaatkan selanjutnya. Umumnya para tokoh masyarakat, pendidik, dan tokoh agama yang berada di luar sistem pemerintahan, mereka ini disebut informal leader yang seharusnya mengambil prakarsa dalam tahap penggalangan. Jika diperlukan out sider

(pihak luar), seperti Perguruan Tinggi, LSM atau organisasi-organisasi yang peduli dalam community development dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi penguatan dalam hubungannya dengan pembangunan. Dalam tahap penggalangan, pada dasarnya untuk memberi pengertian yang mendalam betapa pentingnya masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus sebagai aktor utama dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah mereka sendiri. Tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerahnya, sebagai kekuatan baru yang bersifat kolektif (community power), meskipun pada tahap ini masih sangat prematur, karena masih ada faktor-faktor lain yang harus melengkapinya.

*Kedua*, tahap penggalangan sebagai proses identifikasi potensi masyarakat yang juga ditandai dengan munculnya kesadaran yang tinggi untuk melakukan aktivitas pembangunan, perlu disusul untuk tahap berikutnya yaitu melalui pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat dalam berbagai bidang.

Mencermati situasi dan perkembangan negara kita sekarang ini, maka konteks pemberdayaan masyarakat, selayaknya diarahkan kepada masalah-masalah tersebut dengan maksud agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas faktor-faktor apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana jalan keluar yang tepat untuk penyelesaian masalah. Dengan demikian masyarakat mampu menetapkan apa yang dibutuhkan dan bukan sekedar daftar keinginan yang terlalu menjanjikan, tetapi dalam kenyataan tak pernah terpenuhi. Pendekatan yang diharapkan untuk itu adalah memfasilitasi masyarakat secara edukatif dan memandangnya tidak sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan.

## A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendekatan “*Community Based Training*”(CBT) yaitu menjadi sarana untuk peningkatan wawasan berpikir, kritis dan meningkatkan motivasi untuk membangun wilayahnya. Penerapan pola manajemen dalam lingkup organisasi kemasyarakatan untuk tujuan pembangunan, diharapkan pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki, seperti yang disebut di atas. Menurut **Swasono (1999)**, CBT merupakan konsep dasar pembangunan yang mengarah kepada *sustainability dan self reliance* dari masyarakat dan merupakan komponen pokok pemberdayaan masyarakat.

Konsep CBT memposisikan pelatihan sebagai pusat pengembangan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, tidak saja sebatas memahami persoalan-persoalan yang ada, tetapi mereka mampu mengetahui penyebab-penyebabnya dan cara penyelesaiannya. Di samping itu, kemampuan bekerja sama, konsisten dalam menegakkan aturan-aturan serta memiliki pandangan jauh ke depan untuk kepentingan bersama dan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan.

Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan CBT, adalah: ***pertama***, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Pada tahap ini diperlukan adanya tim yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Perguruan Tinggi dan penggerak lainnya yang peduli terhadap pembangunan masyarakat. Melalui suatu short-list sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, ditetapkan sebagai kebutuhan pelatih, selanjutnya dijadikan acuan untuk penentuan modul pelatihan. Jika dihubungkan dengan keadaan yang ada sekarang, maka kebutuhan yang sangat mendesak, seperti pendidikan politik (bukan politik praktis) sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek penderita tetapi diapun

mampu bersuara dan menyampaikan aspirasinya serta turut serta dalam proses pembangunan. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka juga berhak untuk mengkritik dan menyatakan salah yang memang salah dan benar jika memang benar. Inilah tuntutan era demokratisasi ini. Pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, juga merupakan hal yang mendesak untuk disampaikan kepada mereka. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa dalam era sekarang ini, kunci penting yang harus dibekali kepada masyarakat melalui CBT adalah pendidikan politik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan.

Sendi-sendi pembangunan yang telah ada sebagai produk rezim yang lalu, ternyata rapuh dan jika diibaratkan sebagai kumpulan sendi organ manusia, maka manusia itu tidak lagi mampu melaksanakan fungsinya dengan sempurna, baik untuk berjalan, duduk, makan, apa lagi bekerja. Untuk memperbaiki sendi-sendi tersebut, maka perlu adanya tindakan kuratif (pengobatan). Masyarakat sebagai sub sistem pembangunan nasional, seharusnya dibekali pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan tidak secara terpisah melainkan secara komprehensif. *Kedua*, merupakan langkah berikut setelah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan yaitu pelaksanaan pelatihan. Rencana rinci pelatihan dapat digunakan teknik Modul Employable Skill (MES), teknik yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO) (Swasono, 1999). Pelaksanaan pelatihan (training provider), perlu juga dilatih untuk dapat mengkonversikan kebutuhan pelatihan ke dalam pelaksanaan pelatihan. MES sebagai modul, bisa saja dibuat untuk peruntukan berbagai jenis pelatihan, tergantung dari kebutuhan yang dianggap sangat mendesak untuk suatu masa. Oleh karena itu, untuk pelatihan ekonomi produktif bagi masyarakat misalnya, dapat juga dimanfaatkan modul ini dengan

menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan yang sangat erat dengan tema pokok pelatihan. **Ketiga**, sebagai langkah pengembangan pasca pelatihan, materi-materi yang sudah disajikan pada pelatihan, diharapkan dapat dikembangkan oleh para peserta, baik dalam forum-forum diskusi atau dalam bentuk simulasi. Karena materi yang disajikan dalam lingkup luas, maka akan lebih efektif jika peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai bidang yang diminati. Secara simultan masing-masing kelompok membicarakan topik yang sesuai dengan bidangnya dan bersamaan dengan itu dilakukan pula kegiatan simulasi. Maksudnya adalah untuk mendekati dunia yang sebenarnya atau eadaan nyata di lapangan.

Pada suatu kesempatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, diperlukan adanya forum yang difasilitasi oleh trainer (training provider) untuk mempertemukan seluruh kelompok yang ada. Forum ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada setiap kelompok guna membahas hasil kerja kelompoknya kepada kelompok yang lain. Banyak hal-hal yang positif diperoleh melalui kesempatan tersebut, antara lain : (a) terjadinya pertukaran informasi antar kelompok. Karena untuk membahas seluruh masalah oleh satu kelompok saja, rasanya sulit dan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga dibutuhkan beberapa kelompok yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada. Kelompok satu misalnya, memfokuskan perhatian terhadap demokratisasi, lebih spesifik pada lingkup politik. Kelompok lainnya adalah masalah sosial dan ekonomi. Pertukaran informasi antar kelompok akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh peserta. Pada kesempatan yang sama pertukaran itu akan memunculkan berbagai tanggapan baik mendukung atau mengkritik hasil kerja kelompok-kelompok yang ada. Hal ini mencerminkan terjadinya interaksi belajar mengajar diantara mereka. (b) Mengembangkan sifat kritis dan



keterbukaan. Iklim yang kondusif dalam forum yang dirancang untuk mengoptimalkan aktivitas peserta, akan memberi peluang untuk mengkritisi atau menanggapi permasalahan yang berkembang, tanpa adanya pembatasan-pembatasan yang kaku. Kesiapan menerima dan ditanggapi oleh kelompok lain, merupakan bukti keterbukaan yang perlu dioptimalkan. Hanya saja peran para trainer diharapkan mampu mengarahkan jalannya persidangan (diskusi), agar tetap berada pada koridor yang semestinya. Hal ini diperhatikan agar tidak terjadi debat kusir yang mengarah ke pada melencengnya tujuan yang diharapkan. (c) Meningkatkan motivasi untuk menghadapi keadaan nyata. Pengalaman yang sangat berharga dan mempunyai kesan mendalam terhadap sesuatu yang dihadapi, akan menjadi sumber penggerak kekuatan (driving force) untuk melakukan hal yang sama pada kesempatan yang lain. Diperolehnya pengalaman yang sangat bermanfaat dalam pelatihan, di mana materi pelatihan sangat terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar kita, mendorong untuk lebih jauh melibatkan diri dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di lapangan. (d) Memupuk dan mengembangkan solidaritas kelompok, kebersamaan dan kekompakan yang pada muaranya akan tercipta suatu kekuatan kolektif (kohesif) dalam kelompok atau masyarakat, Modal ini sangat menentukan dan berperan besar dalam keikutsertaan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sejahtera, adil dan merata.

**Keempat,** tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan, apakah rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Prosedur ini sangat penting untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan pelatihan. Ketidaksiharian antara rencana dan pelaksanaan, kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor, misalnya tidak relevannya antara input

(pengetahuan dasar) peserta dengan materi pelatihan, metoda pelatihan yang tidak sesuai dengan tujuan pelatihan dan kemungkinan juga disebabkan oleh pelaksana, baik ketidaksiapan, penguasaan materi dan jadwal pelaksanaan yang kurang tepat dengan kondisi setempat. Kumpulan monitoring ini dapat segera dibenahi sebagai ongoing program untuk kebutuhan sisa waktu yang tersisa. Pada tahap akhir pelatihan diadakan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui berhasil tidaknya pelatihan. Hal ini penting dilakukan untuk dijadikan dasar bagi kegiatan mendsatang. Kelemahn-kelemahan yang ada selama pelatihan sebelumnya, bisa diperbaiki pada pelatihan berikut, sedangkan hal-hal yang dianggap berhasil, perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

## **B. Melibatkan Masyarakat dalam Proses Pembangunan**

Pengalaman menunjukkan bahwa di masa rezim yang lalu, tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan porsinya sedikit dan hanya sekedar mobilisasi, karena sistem yang sentralistik dan over concentration. Keputusan yang diambil untuk pembangunan suatu wilayah, bersifat top-down. Akibatnya program-program pembangunan yang dilaksanakan umumnya siap pakai tanpa menunggu masukan dari bawah. Contoh yang sangat sederhana dan ada diseluruh wilayah Republik ini, adalah program SD Inpres yang puluhan ribu jumlahnya. Baik kualitas, pengoptimalan maupun lokasinya, sangat jauh dari yang diharapkan, meskipun dari sisi lainnya memberi kontribusi yang signifikan dalam proses pendewasaan anak bangsa. Ketika kita berada pada suatu wilayah, baik diperkotaan maupun diperdesaan, SD-SD Inpres yang bertebaran di wilayah tersebut umumnya tidak kondusif dan jauh dari persyaratan yang seharusnya. Kondisi gedung yang sangat rapuh (kualitas jelek), jumlah siswa yang menurun dari tahun ke tahun, lokasi

gedung sekolah yang kurang memenuhi persyaratan untuk prasarana pendidikan. Di pedesaan misalnya, cukup banyak gedung sekolah yang ambruk, padahal masa pakainya relatif baru, belum lagi yang diterpa bencana alam. Praktek-praktek KKN mempunyai andil yang besar atas keadaan tersebut. Seandainya masyarakat dilibatkan secara aktif, karena merekalah yang mengetahui persis keadaan di wilayah tersebut, paling tidak dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian yang justru dampaknya diderita oleh pengguna (anak-anak sekolah). Dari sudut lokasi penempatan, cenderung terjadinya pemerataan di setiap desa atau kota tanpa mempertimbangkan jumlah usia sekolah yang ada. Akibatnya ada sekolah yang hanya memiliki jumlah murid beberapa orang, sementara di tempat lain malah sebaliknya. Sebaiknya tidak mesti terjadi pemerataan pembangunan sekolah, bisa saja sekolah diperuntukkan untuk kebutuhan dua desa atau lebih. Dengan cara ini, kualitas sekolah kemungkinan lebih baik, karena dana yang diperuntukkan untuk membangun setara dengan anggaran pembangunan dua atau tiga SD. Di samping itu optimalisasi sekolah akan lebih tinggikan sarana/peralatan sekolahpun dibandingkan dengan SD-SD inpres lainnya.

Ke depan, kehadiran masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan bangsa, tidak lagi sebagai penerima saja sesuai keinginan dari atas, Karena dengan cara-cara seperti itu, mengakibatkan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* masyarakat sangat rendah dan mungkin tidak ada sama sekali. Untuk itu kesempatan yang sangat baik dalam era sekarang ini untuk memberikan peran seluas-luasnya kepada masyarakat guna ikut merencanakan dan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam pembangunan wilayahnya dengan prinsip *felt-need to real-need*.

### III. KEKOHESIFAN MASYARAKAT SEBAGAI BARGAINING POWER

Seperti dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan, maka kehadirannya bukanlah suatu hal yang luar biasa tetapi merupakan keharusan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi wilayah, kebutuhan yang diperlukan, mereka lebih mengetahuinya.

Modal pengetahuan, kebersamaan dan kesatuan serta komitmen yang kuat dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada untuk mencari alternatif pemecahannya, merupakan kekuatan yang ampuh dalam keikutsertaannya untuk membangun bangsa ini. Hal ini senada dengan pandangan **Booth dan Fear (dalam Winoto, 1999b)** bahwa kehidupan masyarakat menjamin terwujudnya : (1) *pemberdayaan masyarakat* (2) *peningkatan kapasitas masyarakat untuk berkembang dan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi* (3) *untuk meningkatkan ikatan dan jalinan masyarakat sebagai suatu sistem* (to increase the degree of communitiness).

Sifat keterbukaan dan menerima serta dukungan dari pihak pemerintah dalam keterlibatannya untuk membangun, merupakan proses *bargaining power* yang mencirikan adanya suatu kerja sama dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian praktek-prekatek pembangunan yang selama ini kita lihat hanya didominasi oleh pihak pemerintah dan kenyataannya banyak hasil pembangunan yang mubazir dengan biaya yang sangat besar. Pendekatan bottom-up dan digabungkan dengan top-down perlu direalisasikan dan bukan sekedar di atas kertas belaka.

**Pembentukan Lembaga Publik**, sebagai institusi yang dapat dijadikan wadah untuk menghimpun kekuatan dan kebersamaan serta visi yang sama dalam membela kepentingan masyarakat kecil, mutlak kehadirannya. Substansi yang sangat kental didalamnya adalah bagaimana misi lembaga dapat memperjuangkan dan mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada dan berkembang selama ini dalam pretek pembangunan di negara ini.

Lembaga Publik sebagai suatu sistem organisasi, jika dianggap sebagai kekuatan untuk memasuki wilayah kongkrit “kancah pembangunan” maka ada dua hal yang paling utama diperhatikan (**Baehaqie, 2001**), yaitu: memperkuat kelembagaan dengan jalan membuat mekanisme dan aturan yang jelas serta posisi tawar menawar (bargaining position). Kelembagaan Publik sebagai sebagai suatu organisasi yang lahir atas prakara dan inisiatif masyarakat, diharapkan mampu menjebatani pihak pemerintah dan sebagian besar masyarakat kecil (kelompok marjinal) yang selalu terpinggirkan. Untuk itulah para inisiator seperti LSM, PT dan kelompok-kelompok lain yang peduli atas nasib kaum kecil berada pada posisi kunci untuk mengaktualkan keberadaan lembaga ini. Paling tidak kelompok ini memiliki pengetahuan akademik yang relevan dengan permasalahan yang ada, pengalaman lapangan yang cukup dan argumentasi-argumentasi yang kuat dalam menyikapi sepak terjang kaum birokrat/pemerintah yang tidak sepenuhnya menjalankan misi yang seharusnya diemban untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Oleh karena itu maka komitmen Kelembagaan Publik menurut Baehaqie, seharusnya mencirikan: (1) partisipasi, (2) transparansi dan bertanggung jawab (3) objektif dan adil (4) menunjang supremasi hukum (5) prioritas ditentukan pada konsensus masyarakat dan (6) memperhatikan kepentingan masyarakat marjinal.

Kelembagaan Publik seperti ini diharapkan tidak sepenuhnya lagi berada di tangan inisiator. Pengalaman belajar yang dimiliki oleh masyarakat melalui pelatihan, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dalam kelembagaan tersebut untuk kepentingan pembangunan, dan informasi-informasi lainnya, merupakan aset yang berharga dalam menyerahkan kepemimpinan kepada mereka. Estafet kepemimpinan seperti ini, merupakan jawaban atas pemberdayaan yang telah diberikan selama ini dan sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab kepada mereka yang lebih mengetahui kebutuhan pembangunan setempat. Dengan cara penguatan seperti ini, maka secara otomatis, akan melekat dalam diri mereka rasa tanggung jawab, rasa memiliki, keinginan untuk selalu berbuat lebih baik dari yang sebelumnya dan menginginkan pembangunan berjalan terus serta dilandasi oleh kekohesifan yang semakin tinggi.

#### **IV. RE-EDUCATED BAGI BIROKRASI/PEMERINTAH**

Tak adil rasanya jika di satu sisi dilakukan pembenahan, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, sedangkan di sisi lain dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan cara-cara yang dianggapnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengalaman menunjukkan, sangat jauh dari harapan yang semestinya bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan. Itulah yang terjadi selama masa pemerintahan yang lalu, seiring dengan tumbuhnya praktek-praktek KKN yang tidak saja dilakukan oleh pejabat tingkat atas, bahkan menjalar sampai ke pejabat eselon bawah. Begitu asyiknya mereka menikmati keempukan jabatan, tanpa disadari sekian juta rakyat mengalami nasib ketidakcukupan (dalam perangkap kemiskinan) yang

berkepanjangan. Tersirat dibalik praktek-praktek tersebut, seperti yang selalu diungkapkan oleh Prof Affendi Anwar bahwa kecenderungannya “**power tend to corrupt**”, ternyata benar adanya.

Untuk itu, maka upaya-upaya ke arah pembersihan mental para pejabat yang dianggap bagian dari pemicu ketidakstabilan dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi perlu dilakukan **Re-educated** (istilah Prof. Affendi Anwar, merupakan cara yang dianggap tepat untuk dapat memperbaiki kinerja pemerintah yang selama ini keliru menerjemahkan arti pembangunan yang sesungguhnya, mengakibatkan munculnya eksternalitas yang lebih banyak berdampak negatif. Mendidik kembali, menurut penulis tidak sekedar materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang selama ini ada untuk dicari jalan pemecahannya. Namun yang lebih substantif sifatnya dari arti mendidik adalah memperbaiki moral dan etika para pejabat sebagai landasan yang hakiki. Karena hanya dengan landasan itu, mereka dapat menyadari dan bisa keluar dari praktek-praktek yang sesungguhnya menyengsarakan rakyat banyak.

Menurut **Anwar (1996)**, moral biasanya berkaitan dengan kepercayaan (believe) yang diajarkan oleh para rasul dan nabi (bagi yang beragama) berdasar wahyu dan pemikiran elit masyarakat melalui para pengikutnya dan orang tua, biasanya atas dasar ajaran atau kepercayaan tertentu yang diyakininya dan kemudian menjadi aturan perilaku di dalam kehidupan masyarakat.

Moral berisi ketentuan-ketentuan bagaimana sebaiknya orang bersikap dan melakukan suatu tindakan dan kemudian menjadi pedoman dari perilaku seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Melalui pengalaman empirik yang luas dan hasil observasi yang intens terhadap dunia nyata dan manfaatnya dirasakan, maka moral kemudian menjadi etika. Jadi etika menurut **Anwar (1996)**, merupakan suatu kepercayaan

atas dasar moral yang telah didukung oleh pengalaman empirik yang luas. Sikap seseorang atas dasar etika, kemudian merupakan pedoman perilaku yang sangat memberi keyakinan kuat tentang baik buruk dan benar salahnya sesuatu tindakan tertentu yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang atau suatu kelompok bahkan kepada masyarakat umum.

Mendidik kembali (re-educated) bagi birokrat/pemerintah, untuk mempertegas betapa pentingnya moral dan etika sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah rakyat.. Jika moral dan etika mereka kuat, meskipun kesempatan untuk melakukan penyimpangan dalam berbagai hal terbuka luas, tetapi tidak dilakukan. Sikap seperti inilah yang sangat diharapkan, karena ia mengetahui dan meyakini perbuatan itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Seandainya semua pejabat, baik tingkat atas maupun bawah mempunyai prinsip yang sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan moral dan etika, maka selamatlah negara ini dari berbagai bencana. Pembangunan akan berjalan lancar, kesejahteraan rakyat sebagai sasaran utama, insya Allah akan terwujud. Contoh keberhasilan ini adalah Singapura, sebagai negara yang bersih dari praktek KKN, dan mampu mengantarkan rakyatnya pada level atas dalam income perkapita.

## **V. MASYARAKAT SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN**

Mencermati perjalanan panjang sejarah pembangunan bangsa ini, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, hingga saat ini masih jauh dari harapan kita semua. Berbagai kendala silih berganti memasuki ruang-ruang pembangunan, mulai dari penerapan konsep yang keliru sampai kepada aparat pemerintah yang tidak profesional dalam menjalankan misinya. Akibatnya sasaran pembangunan sulit mencapai titik yang sebenarnya, walaupun ada masih



sangat minim. Parahnya lagi praktek-praktek KKN yang tumbuh subur selama ini dan menjalar hampir ke seluruh organ pemerintahan, penyakit ini justru menambah kronisnya permasalahan.

Memasuki babak baru pembangunan di era Reformasi sekarang ini, upaya-upaya ke arah pengikishabisan praktek-praktek KKN telah dilakukan, ditandai dengan memperkarakan/meyidangkan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab dan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan (korupsi) pada masa jabatannya dahulu. Begitu pula para investor swasta yang memiliki koneksi dengan pejabat untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan dalam berbagai sektor, ternyata hasil yang diperoleh bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan segelintir orang saja. Di sisi lain justru menyengsarakan rakyat, akibat terjadinya eksploitasi SDA secara besar-besaran, dampak eksternalitasnya adalah terjadinya degradasi secara drastis, seperti erosi, banjir, kebakaran hutan dan lain-lain. Upaya-upaya di atas dianggap sebagai tindakan **kuratif**.

Upaya preventif, juga dilakukan oleh pemerintah dengan cara menginventarisasi kekayaan pejabat, sehingga mudah dikontrol. Kendati banyak terjadi pro kontra tetapi hal ini memang perlu dilakukan dan selayaknya mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sehingga mekanisme kontrol ini akan mengurangi bahkan menghindari penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi.

Masyarakat sebagai salah satu kekuatan sosial yang telah memiliki kemampuan pengetahuan, pengalaman melalui pelatihan-pelatihan dan keterlibatannya dalam kelembagaan publik, memiliki kesempatan untuk ikut secara langsung dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Pemerintah di sisi lain yang memiliki komitmen kuat untuk membangun dan berpihak kepada masyarakat lapisan bawah dengan tetap berpegang teguh pada moral dan etika (bersih dari praktek-praktek KKN). Dua

kekuatan dalam menopang pembangunan di negara ini, hasilnya akan memberi manfaat yang lebih besar kepada rakyat, jika dibandingkan dengan kekuatan pemerintah saja.

Untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar berorientasi kepada rakyat banyak, maka yang sangat berkepentingan adalah masyarakat yang tahu persis tentang keadaan nyata di lapangan. Makna pembangunan merupakan suatu perubahan yang terencana, dari kondisi yang ada sekarang menuju kondisi yang diharapkan. Perubahan terencana dalam pembangunan (**Winoto, 1999a.**), jika : (1) arah perubahan ditentukan oleh konsensus nilai yang disepakati oleh masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung perubahan terencana yang dilakukan, (2) pembentukan dan peningkatan kapasitas lokal menjadi tujuan utama perubahan terencana, artinya perubahan terencana yang developmental harus mengejawantah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (empowerment), (3) Keputusan-keputusan perubahan terencana haruslah dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat dan keputusan-keputusan tersebut harus dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh lokal (autonomy) dan (4) dalam kaitan dengan poin 3 di atas, partisipasi masyarakat merupakan pondasi dasar praksis pembangunan.

Selama ini ada dua pendekatan yang sangat familiar untuk mendekatkan masyarakat dalam proses pembangunan, yakni keterlibatan dan partisipasi, tetapi nyatanya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam pembahasan ini ada baiknya untuk diungkapkan kembali sebagai dasar berpijak bagi kepentingan pembangunan selanjutnya. ***Keterlibatan masyarakat*** yaitu keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas pembangunan yang diinisiasi dan dikontrol oleh pemerintah atau agen-agen pembangunan dalam bentuk akses tertentu bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dengar pendapat, keterlibatan masyarakat dalam kepanitiaan ad hoc untuk suatu proyek pembangunan.

*Partisipasi masyarakat*, yaitu keterlibatan penuh masyarakat dalam program-program atau proyek-proyek pembangunan yang diinisiasi dan dikontrol oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang menjamin terlaksanya program atau proyek pembangunan tersebut dengan memberikan frame (arah) umum pembangunan yang telah disepakati bersama.

Pendekatan yang paling sesuai dengan keadaan sekarang ini, adalah partisipasi masyarakat, dan hal ini senapas dengan tuntutan reformasi. Peran masyarakat sejak awal direncanakan program pembangunan telah terklibat secara langsung, sampai pada pelaksanaan dan akhir pelaksanaan program. Kontrol dan evaluasi juga dilaksanakan oleh masyarakat. Keadaan ini akan memberi perhatian sungguh-sungguh bagi pihak yang terlibat dalam pembangunan, karena baik pelaku, pengontrol dan pengguna hasil pembangunan berada dalam satu kesatuan, yaitu masyarakat itu sendiri. Disertai dengan kekohesifan yang kokoh dari proses belajar, pengalaman dan kebersamaan serta komitmen selama ini, maka yang ada dalam benak mereka, bagaimana mengejar ketertinggalan selama ini untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pengalaman empirik telah menunjukkan berbagai keterbatasan pemerintah (*Government incapacity*) di dalam memerankan fungsinya sebagai perencana dan pengelola pembangunan, dominasi informasi dan kekuasaan yang tidak proporsional oleh pemerintah yang cenderung mengklaim bahwa pihaknyalah yang memiliki otoritas di dalam pengelolaan sumberdaya publik yang pada kenyataannya tidak dapat mengelola dengan baik. (**Anwar dan Rustiadi, 2003**). Kegagalan pemerintah disebabkan karena public sector selalu dipandang sebagai vertical sector, sehingga timbul rantai birokrasi yang panjang dalam pelayanan masyarakat (**Moe dalam Anwar dan Rustiadi, 2003**). Moe menjuluki rantai birokrasi sebagai “ *chain of principal- agent*”

*relationship*” dengan struktur rantai sebagai berikut *citizen-politician-bureaucratic superior-bureaucratic sub ordinate-lowest bureaucrat-citizen*.

Secara historik kegagalan program-program pembangunan di dalam mencapai tujuannya di satu sisi seringkali bukanlah semata-mata kegagalan di dalam program pembangunannya, melainkan ada sisi sumbangan kesalahan karena berkembangnya kepercayaan akan kebenaran teori-teori atau konsep-konsep pembangunan yang melandasinya. **Rustiadi dkk (2003)** menyatakan bahwa di dalam lingkup keilmuan itu sendiri, teori pembangunan selalu berkembang dan mengalami koreksi, sehingga melahirkan pergeseran tentang sesuatu yang dianggap benar dan baik di dalam proses pembangunan. Cara pandang yang semula dianggap benar dan baik, akibat pelajaran dari pengalaman, pergeseran nilai-nilai kehidupan dan perkembangan teknologi atau cara analisis baru, maka dikemudian hari akhirnya dianggap salah dan tidak baik. Dalam ungkapan sehari-hari didebut sebagai pergeseran paradigma.

Secara **filsafat** terdapat beberapa ruang pengetahuan : (1) kita tahu bahwa kita tahu, (2) kita tahu bahwa kita tidak tahu, dan (3) kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Perkembangan waktu, pengalaman manusia, perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan semakin luasnya ruang pengetahuan yang pertama. Perkembangan ini menyebabkan selalu dimungkinkan timbulnya paradigma-paradigma baru termasuk paradigma pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh sosiolog **Kuhn, 1970** tentang paradigma (**dalam Rustiadi dkk, 2003**).

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak lagi sebagai *segalanya*, dan masyarakat hanya menunggu belas kasihan. Jangan lagi terulang, kepentingan pembangunan untuk penguasa, pembangunan diarahkan pada lokasi yang dekat dari penguasa, dalam istilah **Garcia-Garcia (2000)**

“Pro Java and Pro Urban”. Posisi pemerintah sudah jelas, dia hanya bertindak sebagai mediator dan fasilitator, selain itu dilimpahkan kepada masyarakat. Proses ini merupakan alam pendewasaan. Nilai edukatif yang tersirat dalam pendelegasian itu adalah menyadari bahwa potensi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan, peran sertanya harus dioptimalkan dan akan bertanggung jawab untuk melaksanakan sepenuhnya tugas itu. Mempertahankan dan menjaga hasil-hasil yang sudah dicapai, secara otomatis melekat dalam diri anggota masyarakat.

Harapan yang lebih jauh ke depan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dan diperuntukkan untuk masyarakat, tidak sekedar mencapai satu atau dua sasaran saja, melainkan secara bertahap kegiatan pembangunan harus terus dilakukan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai tanggung jawab moral bagi generasi sekarang untuk generasi berikutnya, memerlukan berbagai kondisi yang memungkinkan bisa terwujud, yaitu :

- (a) sistem politik yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan
- (b) ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan,
- (c) sistem sosial yang memberi peluang kepada seluruh kelompok masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan,
- (d) proses belajar secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas dalam mengisi pembangunan,
- (e) memanfaatkan SDA yang seefektif mungkin dengan tetap menjaga kelangsungan ekosistem dan
- (f) meningkatkan sistem pengadministrasian untuk mengontrol aktivitas pembangunan dari waktu ke waktu **(Winoto, 1999.b)**.

Terjadinya pergeseran paradigma perencanaan pembangunan yang nampak sekarang ini, memungkinkan adanya perubahan sistem perencanaan dalam berbagai level pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksudkan seharusnya dimulai dari tingkat lokal,

regional hingga nasional. Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat, terutama dalam investasi sosial kapital. Untuk itu seluruh stakeholders yang ada terlibat secara efektif, hal ini memungkinkan terjadinya proses pembangunan sosial kapital yang tangguh untuk bersama-sama dalam proses perencanaan. Tetapi harus pula diingat bahwa hal ini dapat berjalan dengan baik jika kondisi-kondisi : stabilitas politik, keamanan, ekonomi, kebebasan dan berlangsungnya secara terus menerus proses belajar-mengajar ke arah perbaikan kualitas SDM, berjalan secara kondusif.

## **VI. PENUTUP**

Memasuki era desentralisasi melalui otonomi daerah, diharapkan peran lokal akan semakin tinggi dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lapisan bawah untuk diberdayakan, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Kekohesifan masyarakat sebagai kekuatan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun negara ini, sangat diperlukan dan seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah yang memiliki moral dan etika di dalam menjalankan misi dan tanggung jawabnya serta senantiasa berada pada koridor yang benar, lebih bersifat fasilitator dan menggurui. Kondisi seperti ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

Harapan kita semua bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara simultan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal (kabupaten/kota) atas prinsip-prinsip otonomi daerah maka ketimpangan-ketimpangan pembangunan seperti terjadi sebelumnya yang terlalu memihak ke *wilayah barat*, tidak lagi terjadi. Sehingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik ini dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA :

- Anwar, Affendi. 1996. Pentingnya Peranan Etika dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal PWD, Volume 1 No. 2.
- Anwar, Affendi dan Ernani Rustiadi. 2003. Alternatif Sistem Perencanaan Pembangunan Bagi Indonesia di Masa Depan. Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ekonomi Politik Baru Pasca UUD 1945. HPWD dan PWD, Jakarta.
- Baehaqie, Ahmad. 2001. Kelembagaan Publik suatu Keharusan yang Mendesak. Makalah disampaikan pada Sarasehan Pemerhati Kota Bogor, tanggal 5 Mei 2001.
- Garcia-Garcia, Jorge. 2000. Indonesia’s Trade and Price Interventions : Pro Java and Pro Urban. Bulletin of Indonesia Economic Studies, Volume 36 No. 3.
- Rustidi, Ernani dkk. 2003. Perencanaan Pengembangan Wilayah, Konsep Dasar dan Teori. Institut Pertanian Bogor.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and its Discontents. W.W. Northon & Company
- Swasono, Yudo. 1999. Community Based Training. Dalam Tiga Pilar Pembangunan. BPPT, University of Indonesia Press.
- Winoto, Jyo. 1999a. Pembangunan: Sari Tema Teori-Teori Pembangunan Lintas Madzhab. Ekonomi Pembangunan, Buku I A. Program Studi PWD-IPB
- ..... 1999b. Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Ekonomi. Buku IA. Program Studi PWD-IPB.
- Yusuf, Yusmar. 1990. Keadaan Kohesif Kelompok terhadap Partisipasi dalam Komuniti pada Kelompok Nelayan di Tanjung Pinang, Riau. Bulletin Penelitian Pascasarjana Unpad.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepada bapak Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, M.Sc, Prof.Dr.Ir. Zahrial Coto, M.Sc dan Dr. Ir. Hardjanto, masing-masing selaku pengasuh mata kuliah Pengantar Ke Falasafah Sains (PPs 702), yang telah membekali penulis selama proses belajar-mengajar berlangsung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan tersebut, sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan sebagai salah satu tugas wajib mata kuliah ini.